



KHI

Kajian Hubungan Internasional

1. KAJIAN FEMINISME DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER
STUDI KASUS: PERANAN BEAUTY VLOGGER DALAM PERDAGANGAN KOSMETIK INTERNASIONAL
Aditya Hidayat, Adi Joko Purwanto S.IP., M.A
2. FAKTOR PENDORONG KEBIJAKAN PENGURANGAN PRODUKSI MINYAK OPEC
DI ERA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020
Inti Qoun Naji, Dr. Ali Martin, S. Ip., M. Si
3. DIPLOMASI BUDAYA AMERIKA SERIKAT MELALUI MUSIK POP DI INDONESIA
(STUDI KASUS FENOMENA MICHAEL JACKSON DI INDONESIA)
Farah Praweswari Novitasafitri, Anna Yulia Hartati, S.IP., MA
4. KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA ERA PRESIDEN JOKOWI DALAM PENYELESAIAN
KRISIS KEMANUSIAAN DI ROHINGYA TAHUN 2014-2019
Iham Fulahul Alam, Adi Joko Purwanto, S.IP., M.A
5. HAMBATAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI AGREEMENT ON AGRICULTURE (AoA)
WTO PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI TAHUN 2014-2019
Alfat Naufal Amperawan, Dr. Dra. Ismiyatun, M.Si
6. PERDAGANGAN MANUSIA DI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) TAHUN 2016-2017
Elisabeth Palmiani Bheni, Adi Joko Purwanto, S.IP., M.A.
7. KERJASAMA INTERNASIONAL KOREA SELATAN DENGAN INDONESIA (STUDI KASUS PENINGKATAN STATUS
KERJASAMA DARI STRATEGIC PARTNERSHIP MENJADI SPECIAL STRATEGIC PARTNERSHIP TAHUN 2017)
Ervina Arini, Anna Yulia Hartati, S.IP., M.A
8. DIPLOMASI PARIWISATA DALAM MENJADIKAN DIENG DESTINASI PARIWISATA INTERNASIONAL
Chalimatus Sa'diyah, Dr. Ismiyatun, M.Si.
9. KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA MENJADIKAN KAWASAN KARS GUNUNG SEWU
SEBAGAI UNESCO GLOBAL GEOPARK NETWORK (GGN)
Rahadyan Arka Shunu, Anna Yulia Hartati, S.IP., M.A
10. PENGARUH PENERAPAN INDONESIA-JAPAN ECONOMY PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)
TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR JEPANG DI INDONESIA TAHUN 2008-2018
A Hamad Maulana Nur Hidayat, Dr. H. Andi Purwono, S.IP., M.Si



ALAMAT PENERBIT :

Laboratorium Diplomas
Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim
Jl. Menoreh Tengah X No.22, Sampangan,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50232

EDITORIAL TEAM

Ismiyatun (Head of Department of International Relations)

Managing Editor

Adi Joko Purwanto (Head of lab.of Diplomacy)

Anna Yulia Hartati

Sugiarto Pramono

Ali Martin

Peer Reviewer

Tirta Mursitama (Bina Nusantara University)

M.Rosyidin (Diponegoro University)

LABORATORIUM DIPLOMASI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
JL. Menoreh Tengah X / 22, Sampangan, Gajahmungkur,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah pada tahun 2021 ini, Lab Diplomas Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) FISIP Unwahas, berhasil menerbitkan Jurnal ilmiah “Kajian Hubungan Internasional”. Jurnal ilmiah ini akan terbit dua kali selama satu tahun, setiap bulan April dan Oktober. Penerbitan jurnal ini bertujuan meningkatkan atmosfer akademik di lingkungan Universitas Wahid Hasyim pada umumnya serta Program studi Ilmu Hubungan Internasional pada khususnya.

Sasaran utama dari Kajian Hubungan Internasional adalah penelitian bersama antara Mahasiswa dan Dosen, baik berasal dari riset skripsi maupun riset kolaboratif lainnya. Dengan penerbitan ini maka semakin memberikan banyak kesempatan bagi mahasiswa Hubungan Internasional – dalam skope nasional maupun internasional guna mempublikasikan beragam risetnya bersama dosen pembimbingnya sebagai rekanan.

Pada Vol I , No 1 ini, sebagai pembukanya kami menampilkan hasil riset dari Aditya Hidayat, Inti Qoun Naji, Farah Pramesti Novitasafitri, Alfat Naufal Amperawan, Elisabeth Palmi Bheni, Ervina Arini, Chalimatus Sa'diyah, Rahadyan Arka Shunu dan Ahmad Maulana Nur Hidayat. Semua Karya mereka diangkat dari tugas akhir / skripsi mereka.

Aditya Hidayat mengupas paham feminisme liberalism, sebagai bagian dari kelompok *non mainstream* , emengungkapkan fungsi dari beauty vlogger sebagai brand ambassador guna meningkatkan penjualan. Inti Qoun Naji mengungkapkan alasan Kebijakan Pengurangan Produksi Minyak OPEC di Era Pandemi Covid 19, dari sudut pandang dampak pandemi atas aktivitas industrialisasi,. Problem Diplomas Budaya dieksplorasi oleh Farah Pramesti melalui risetnya “Diplomasi Budaya Amerika Serikat melalui Musik Pop di Indonesia : Studi Kasus Fenomena Michael Jackson di Indonesia, juga Chalimatus Sa'diyah melalui judul “Diplomasi Pariwisata dalam Menjadikan Dieng Destinasi Pariwisata Internasional. Kaitan kepentingan nasional dengan diplomasi budaya dieksplorasi oleh Rahadyan Arka Shunu dengan “ Kepentingan Nasional Indonesia Menjadikan Kawasan Kars Gunung Sewu sebagai UNESCO Geopark Network (GGN).

Topik Kluster Perdagangan Internasional diwakili oleh risetnya Alfat Naufal Amperawan berjudul “Hambatan Indonesia dalam Implementasi Agreement on Agriculture (AoA) WTO pada Masa Pemerintahan Jokowi Tahun 2014-2019”. Isu keterkaitan antara Perdagangan Internasional dengan Kerjasama internasional dikupas Erniva Arini melalui “Kerjasama Internasional Korea Selatan dengan Indonesia : Studi Kasus Peningkatan Status Kerjasama dari Strategic Partnership menjadi Special Strategic Partnership tahun 2017. Sedangkan Ahmad Maulana Nur Hidayat mengkritisi isu ini melalui “Pengaruh Penerapan Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IIEPA) terhadap Peningkatan Investasi Sektor Industri Manufactur Jepang di Indonesia Tahun 2008-2-18.

Permasalahan Perdagangan Manusia merupakan interseksi antara kluster perdagangan internasional dengan Studi Kawasan. Indonesia menjadi salah satu negara lokasi terbesar dalam kasus ini. Elisabeth Palmi Bheni meneliti kasus ini melalui “Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016-2017”. Semoga kehadiran Kajian Hubungan Internasional ini mampu memperkaya khasanah pustaka ilmiah sebagai rujukan penelitian bagi para peneliti Hubungan Internasional baik skope, regional, nasional maupun internasional.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
EDITORIAL TEAM	ii
KATA PENGANTAR	iii
<i>ABSTRACT</i>	72
A PENDAHULUAN	73
1. LATAR BELAKANG	73
2. RUMUSAN MASALAH.....	75
3. TUJUAN PENELITIAN.....	75
4. KERANGKA TEORI	75
5. HIPOTESIS	79
B METODE PENELITIAN.....	79
C HASIL DAN PEMBAHASAN.....	79
1. Awal mula konflik krisis kemanusiaan rohingnya	79
2. Dinamika konflik kemanusiaan Rohingya tahun 2014-2019	83
3. Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Jokowi Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Di Rohingya Tahun 2014-2019.....	86
Kebijakan Pemberian Bantuan Kemanusiaan	88
Kebijakan Bantuan Ke Pengungsi.....	89
Kebijakan Melakukan Diplomasi Bilateral Indonesia Terhadap Myanmar	92
D KESIMPULAN.....	96
E DAFTAR REFERENSI	96

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA
ERA PRESIDEN JOKOWI DALAM PENYELESAIAN KRISIS
KEMANUSIAAN DI ROHINGYA TAHUN 2014-2019

Ilham Falahul Alam¹, Adi Joko Purwanto,S.IP., M.A²

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia

ABSTRACT

This thesis aims to analyze Indonesia's foreign policy in the era of President Jokowi in resolving the humanitarian crisis in the Rohingya from 2014 to 2019. This research is based on the ethnic conflict that occurred in Myanmar, namely between the Rohingya ethnicity who is predominantly Muslim and the Rakhine ethnic Buddhist. does not recognize the population of the Rohingya minority living in Rakhine as citizens of Myanmar because they do not have a clear identity and are considered refugees. This problem has been going on for years because the problem is very complex. This research was written using qualitative descriptive writing techniques, and the data obtained were not directly from the object of the field research. Researchers get data from existing literature such as books, journals, articles, news. By using the perspective of Kegley and Wittkopf that in making foreign policy using the rational choice model, there are four steps that must be followed by policy makers, namely Problem Recognition and Definition, Goal Selection, Identification of Alternatives, and Choice. The result of this research is that the Government of Indonesia takes a decision which considers the costs and benefits of the national interest. In the end, Indonesia adopted a policy of providing humanitarian assistance, a policy of assistance to refugees, a policy of carrying out Indonesia's bilateral diplomacy towards Myanmar.

Keywords: Indonesian Policy, Pollugri, Rohingya

Abstrak

¹ Mahasiswa Hubungan Internasional Fisip Unwahas Angkatan 2016

² Dosen Fisip Universitas Wahid Hasyim Semarang

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan luar negeri Indonesia pada era Presiden Jokowi dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Rohingya dari tahun 2014 hingga 2019. Penelitian ini didasari dari konflik etnis yang terjadi di Myanmar, yaitu antara Etnis Rohingya yang mayoritas beragama Muslim dan Etnis Rakhine beragama Budha. Pemerintah Myanmar tidak mengakui kependudukan suku minoritas Rohingya yang berada di Rakhine sebagai warga negara Myanmar karena tidak mempunyai identitas yang jelas dan dianggap sebagai pengungsi. Persoalan ini berlangsung menahun karena masalahnya yang sangat kompleks. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan teknik penulisan Deskriptif Kualitatif, dan data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek penelitian lapangan. Peneliti mendapat data dari literatur yang ada seperti buku, jurnal, artikel, berita. Dengan menggunakan perspektif dari Kegley dan Wittkopf bahwa dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang menggunakan model *rational choice* terdapat empat langkah yang harus diikuti oleh para pembuat kebijakan, yakni *Problem Recognition and Definition, Goal Selection, Identification of Alternatives, dan Choice*. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia mengambil keputusan dimana mempertimbangkan *cost & benefit* terhadap *national interest*. Pada akhirnya Indonesia mengambil kebijakan pemberian bantuan kemanusiaan, kebijakan bantuan ke pengungsi, kebijakan melakukan diplomasi bilateral Indonesia terhadap Myanmar.

Kata Kunci : Kebijakan Indonesia, Polugri, Rohingya

A PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Politik internasional tahun 2012 masih diwarnai dengan konflik etnis yang melanda beberapa negara. Yang sedang hangat dibicarakan dan menuai respon dari PBB serta banyak negara adalah konflik etnis yang terjadi di Myanmar, yaitu antara Etnis Rohingya (Muslim) dan Etnis Rakhine (Budha). Hingar bingar berita tentang Muslim Rohingya timbul menyusul konflik sektarian yang terjadi antara etnis Rohingya yang sebagian besar adalah Muslim dan etnis Rakhine yang mayoritas merupakan penganut Buddha.

Konflik yang terjadi di Myanmar terhadap kelompok suku minoritas Rohingnya merupakan permasalahan yang cukup kompleks. Konflik tersebut sudah bermula sejak zaman dahulu ketika Myanmar masih bernama Burma sekitar tahun 1942³. Konflik muncul ketika terjadi pembantaian terhadap kelompok minoritas Rohingnya di Arakan oleh kelompok Budha. Konflik semakin berkembang ketika pemerintah Myanmar memberlakukan Undang-Undang kependudukan di Myanmar. Pemerintah Myanmar tidak mengakui kependudukan suku minoritas Rohingnya yang berada di Rakhine sebagai warga negara Myanmar karena tidak mempunyai identitas yang jelas dan mereka dianggap sebagai pengungsi pada masa kudata junta militer, mereka merupakan pengungsi yang sudah tinggal di negara bagian Rakhine selama berabad abad dan turun temurun. Padahal, di masa-masa awal kemerdekaan Myanmar, Rohingnya adalah salah satu etnis dan rumpun ras yang diakui, baik di dalam Konstitusi maupun di dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam situasi ini komunitas internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tidak dapat melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan ini, karena secara faktual Pemerintah Myanmar menolak untuk bekerjasama, serta keterbatasan yang masih ada pada mekanisme ASEAN untuk penyelesaian konflik internal yang berdampak regional, Pemerintah Indonesia memiliki peranan penting diplomatik yang telah diterima oleh pemerintah Myanmar, di samping sejumlah kerjasama bilateral dengan militer Myanmar juga telah dilakukan. Untuk itu, memaksimalkan peranan diplomatik Indonesia dengan pemerintah Myanmar adalah salah satu celah saat ini yang bisa dilakukan secepatnya untuk menghentikan kekerasan tidak berlanjut dan membangun kesepakatan agar hal ini tidak terulang kembali ke depan.⁴Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi dan mendorong aksi nyata dalam penyelesaian konflik ini. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus membantu

³<https://hukamnas.com/latar-belakang-konflik-rohingya> diakses pada senin, 6 juli 2020 pukul 22.34 wib

⁴<https://hrwg.org/2017/09/03/diplomasi-penyelesaian-konflik-permanen-indonesia-myanmar-diperlukan-untuk-mencegah-keberlangsungan-brutalitas-dan-kekerasan/>diakses pada senin, 10 juli 2020 pukul 12.30

mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional, presiden Jokowi, menugaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekretaris Jenderal PBB dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia pada bulan Januari dan Februari lalu telah mengirimkan 10 kontainer obat-obatan dan makanan. Serta akan membangun sekolah dan rumah sakit pada bulan Oktober yang akan datang.⁵ Hal ini tentunya menjadi isu yang sangat rentan konflik di Asia Tenggara sehingga sebagai negara tetangga sekaligus ketua dari keamanan dan politik ASEAN Indonesia melakukan *polugri* dan *soft diplomacy*.

2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Jokowi dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Di Rohingya Tahun 2014-2019?

3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Jokowi dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Di Rohingya Tahun 2014-2019

4. KERANGKA TEORI

Konflik yang terjadi di Myanmar adalah Teori Kebijakan Luar Negeri. Secara umum politik luar negeri ialah sebuah pedoman bagi suatu negara dalam bertindak dalam lingkungan eksternalnya. Tidak hanya itu, politik luar negeri (*foreign policy*) juga diartikan sebagai komitmen dasar berupa sebuah strategi dalam mencapai tujuan atau kepentingan dalam konteks luar negeri dan dalam negeri yang turut menentukan keterlibatan suatu negara dalam isu-isu internasional. Arti lain kebijakan luar negeri turut dimaknai sebagai

⁵<https://www.theindonesianinstitute.com/langkah-diplomasi-indonesia-dalam-konflik-rohingya/> diakses pada senin, 10 juli 2020 pukul 14.00

sebuah strategi ataupun tindakan yang diambil oleh suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain guna untuk mencapai kepentingannya.

Menurut Tayfur kebijakan luar negeri merupakan sebuah bentuk kegiatan resmi yang dirumuskan dan di implementasikan oleh agen-agen resmi dari negara berdaulat sebagai sebuah orientasi, rencana, komitmen, dan tindakan ditujukan kepada lingkungan eksternal negara.⁶ Selanjutnya menurut Kegley dan Withkopf kebijakan luar negeri merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang berwenang terhadap lingkungan internasional yang di dasari adanya kepentingan dan tujuan nasional serta sekaligus pendapat nilai dan instrumen dalam mengejar tujuan tersebut.⁷ Sedangkan menurut Webber dan Smith kebijakan luar negeri ialah suatu kebijakan yang terdiri dari upaya mencapai tujuan, nilai, pengambilan keputusan, dan tindakan yang diambil oleh negara dimana pemerintah sebagian besar mengambil andl dalam bertindak dngan pihak luar atau lingkungan eksternal, selain itu turut mengontrol masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan luar.⁸

Agar dapat memahami teori kebijakan luar negeri atau politik luar negeri ini, Yanyan Mohmad Yani memisahkan arti dari politik dan luar negeri. Politik ialah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Policy berakar dari konsep choiches yang berarti pilihan dimana bermakna dapat memilih tindakan atau membuat keputusan mencapai suatu tujuan.⁹ Sementara itu luar negeri (foreign) berkaitan dengan konsep wilayah atau kedaulatan yang berarti kontrol terhadap wilayah yang miliki suatu negara.¹⁰ Jadi politik luar negeri (foreign) berarti seperangkat

⁶ Fatih Tayfur, *Main Approaches to The Study of Foreign Policy: A Review*, Department of International Relations, Middle East Technical University, Turkey, 1994, hal.113-141

⁷ Kegley Charles W. Jr, Wittkopf Eugene R, *World Politics: Trend and Transformation*, 6 th ed., New York: St.Martin's Press, 2001, hal.55

⁸ Mark Webber, Michael Smith, *Foreign Policy in Transformed World*, Prentice Hall, London, 2002, hal.11-12

⁹ Yanyan Mochmad Yani, *Politik Luar Negeri*, (Paper yang disampaikan dalam kegiatan Seminar Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau SESCO TNI AU, Angkatan ke-44 TP 2007), Bandung, 16 Mei 2007, hal. 1

¹⁰ Ibid, hal. 2

pedoman dalam memilih tindakan yang di tujukan keluar wilayah suatu negara.

Dari beberpa penjabaran definisi kebijakan luar negeri menurut para ahli, penulis menyimpulkan bahwa kenijakan kuar negeri merupakan instrumen yang digunakan suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya terhadap negara lain.

Dalam analisis kebijakan luar negeri terdapat tiga model pembuatan kebijakan luar negeri, salah satunya ialah model *rational choice*. Model pembuatan kebijakan luar negeri ini menggunakan *unitary actors* sebagai *decision makers*. Selain itu dalam model *rational choice*, *national interest* digunakan sebagai penyelasan rasional dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri tersebut.¹¹

Menurut Allison dan Zelikow *rational choice* ialah tindakan analisis yang dilakukan oleh negara dengan asumsi bahwa negara mempertimbangkan semua pilihan dan kemungkinan untuk kemudian bertindak secara rasional untuk memaksimalkan utilitas (pemanfaatan kapasitas yang ada) dan keuntungan yang diperoleh.¹² Menurut Kegley proses pembuatan kebijakan *rational choice* merupakan prosedur pengambilan keputusan yang dipandu oleh pendefinisian hati-hati dari sebuah situasi, menimbang tujuan, mempertimbangkan semua alternatif dan pemilihan opsi paling menguntungkan serta memungkinkan untuk mencapai tujuan tertinggi.¹³

Terdapat beberapa variabel-variabel penting dalam model *rational choice* yakni:¹⁴

- a) Pemerintah negara diperlakukan sebagai aktor utama

¹¹ Kegley Charles W. Jr, Wittkopf Eugene R, *World Politics: Trend and Transformation*, 6 th ed., New York: St.Martin's Press, 2001.

¹² Graham Allison, Philip Zelikow, *Essence of Decision Making: Explaining the Cuban Missile Crisis*, 2nd Edition, Longman Inc., 1999.

¹³ Charles W. Kegley Jr., *World Politics, Trend, and Transformation*, University of Memphis, USA, 2011, Pg.196.

¹⁴Ibid

- b) Informasi yang dimiliki oleh pemerintah adalah lengkap
- c) Pemerintah memproses informasi sesuai dengan aturan mengoptimalkan tindakan rasional
- d) Pemerintah mengkaji semua tujuan dan kepentingan, mengevaluasi sesuai dengan utilitas mereka, kemudian mengambil salah satu keputusan dimana mempertimbangkan *cost&benefit* terhadap *national interest* negaranya

Kegley dan Wittkopf menjelaskan bahwa dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang menggunakan model *rational choice* terdapat empat langkah yang harus diikuti oleh para pembuat kebijakan, yakni :¹⁵

1. Problem Recognition and Definition

Pada langkah pertama ini *decision makers* harus mengetahui masalah eksternal yang ada dan kemudian mencoba secara objektif untuk membedakan karakteristiknya. Objektif yang dimaksud ialah mengumpulkan informasi secara menyeluruh tentang isu, aksi, pergerakan, dan kapabilitas aktor lain sehingga informasi yang dikumpulkan secara menyeluruh sesuai dengan fakta permasalahan tersebut.

2. Goal Selection

Decision makers harus mengetahui dan mendefinisikan tujuan apa yang ingin dicapai. Pada langkah ini juga dibutuhkan identifikasi serta peringkat semua nilai-nilai terhadap hal-hal yang diutamakan seperti untuk keamanan atau kesejahteraan ekonomi. Kepentingan nasional biasanya merupakan tujuan atau prioritas utama.

3. Identification of Alternatives

Setelah pendefinisian atau pengidentifikasian isu serta penentuan tujuan maka rasionalitas dibutuhkan dalam penyusunan data-data secara menyeluruh terhadap daftar lengkap dalam

¹⁵ Ibid

menentukan alternatif-alternatif atau opsi-opsi kebijakan yang akan dibuat.

4. Choice

Rasionalitas dibutuhkan dalam memilih satu pilihan tunggal yang memiliki kemungkinan terbesar dalam keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Pemilihan satu kebijakan ditetapkan ketika *decision makers* telah memiliki prediksi yang akurat atas keberhasilan alternatif yang dipilih.

5. **HIPOTESIS**

Kebijakan luar negeri Indonesia era presiden Joko Widodo dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Rohingya adalah sebagai berikut: kebijakan pemberian bantuan kemanusiaan, kebijakan bantuan ke pengungsi, dan kebijakan melalui diplomasi bilatearal.

B METODE PENELITIAN

Yakni penelitian yang memberi penjelasan secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Yakni data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek penelitian lapangan.

C HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Awal mula konflik krisis kemanusiaan rohingya**

Muslim Rohingya bukanlah satu-satunya etnis muslim di Myanmar, namun muslim selain Rohingya mengidentifikasi diri sebagai muslim Myanmar dan muslim pribumi. Kebanyakan masyarakat muslim Myanmar merupakan orang-orang keturunan dari India dan Burma melalui antar-perkawinan berabad-abad lalu. Orang muslim Myanmar (selain Rohingya yang berasimilasi dengan Myanmar) yang ditarik dari Etnis Rakhine terkadang merasa terganggu oleh perlakuan dan kebijakan junta militer Myanmar terhadap orang Rohingya, karena secara demografis orang Rohingya berada di Arakan. Orang Rakhine menganggap mayoritas Bamar ingin menguasai Arakan dengan cara

membaurkan orang Rakhine dengan Bamar. Namun orang Rakhine juga menganggap keberadaan etnis Rohingya sebagai bentuk dari islamisasi Bangladesh dan tidak mau menerima mereka sebagai penduduk pribumi Negara Bagian Rakhine. Meskipun orang Rakhine tidak tercatat melakukan kekerasan terhadap etnis Rohingya, diam-diam mereka telah mendukung Bamar dalam pembersihan etnis demi menjaga tanah air mereka dari islamisasi dan imigrasi ilegal.

Etnis Rohingnya secara umum tidak seberuntung Etnis Bengali yang sudah hidup nyaman sebagai warga Negara sejak jaman kolonial Inggris. Kedua etnis ini bukan penduduk asli wilayah Myanmar (Burma). Etnis Bengali telah secara bebas hidup secara social ekonomi dan bebas menganut agama, dan bahkan banyak yang menganut agama Islam. Yang beragama Islam mereka bebas melakukan peribadatan dan banyak masjid yang didirikan di kota besar di Myanmar. Masalah Rohingya sampai saat ini masih belum dapat tertangani secara total.

Persoalan ini berlangsung menahun karena masalahnya yang sangat kompleks. Konflik antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya diawali dengan saling menuduh satu sama lain untuk siapa yang melemparkan batu pertama kali dan kemudian melakukan pembantaian berikutnya, klaim orang etnis Rakhine mengatakan bahwa etnis Rohingya membantai orang Arakan, namun klaim ini dibalas oleh etnis Rohingya yang menyatakan bahwa lebih dari 100.000 muslim dibunuh oleh orang Buddhis pada masa Perang Dunia Ke II dan muncul ke media.¹⁶ Konflik antara etnis ini terus berlanjut hingga sekarang, namun yang paling menderita dan mengalami penindasan dalam konflik ini ialah etnis Rohingya, dimana mereka merupakan etnis minoritas di Myanmar dan etnis Rakhine didukung oleh pemerintah militer di Myanmar. Konflik etnis di Myanmar terkhusus Rohingya sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, bahkan Human Right Wacth menyatakan

¹⁶<https://www.rohingya.org/the-muslim-massacre-of-1942/>

bahwa etnis Rohingya adalah etnis yang paling tertindas di Asia Tenggara bahkan di dunia.

Pada akhir tahun 2016 tepatnya pada 9 Oktober, ARSA menggandeng ratusan pria Rohingya yang dipersenjatai pisau hingga senapan, mereka menyerang pos-pos polisi di Negara Bagian Rakhine dan menewaskan sembilan petugas. Kemudian, terjadi aksi balas dari polisi dan militer Myanmar. Namun apa daya tentara dan polisi itu ternyata kalah banyak dan terkepung dan terjadi kontak senjata dan menewaskan puluhan aparat. Pasca kejadian ini aparat keamanan Myanmar menilai situasi sudah tidak kondusif, hingga mereka melakukan operasi khusus dan berdampak pada jatuhnya korban warga Rohingya, karena mereka menyerang beberapa kampung yang dijadikan tameng oleh kelompok Radikal. Jumlah korban masyarakat sangat banyak dan terindikasi juga terjadi pelanggaran HAM oleh tentara dan polisi Myanmar pada saat operasi militer tersebut. Terjadi eksodus pengungsi ke Bangladesh utamanya, yaitu sebanyak 87.000 muslim Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh.¹⁷

Tidak berhenti disini, serangan militan masih terus berlanjut. Pada 25 Agustus 2017, ARSA kembali melakukan serangan terhadap pos-pos polisi dan markas tentara di Negara Bagian Rakhine. Militer Myanmar menyatakan sedikitnya 71 orang tewas sewaktu pemberontakan Rohingya terjadi. Menurut pihak berwenang, pos-pos polisi itu diserang pada hari jumat waktu dini hari oleh sekitar 150 pemberontak yang bersenjatakan senapan dan bom rakitan. ARSA mengaku bertanggungjawab atas serangan itu dan memperingatkan akan serangan-serangan lainnya.¹⁸ Jumlah korban tewas akibat bentrokan di negara bagian rakhine, Myanmar, terus meningkat hingga sedikitnya mencapai 96 orang. Jumlah korban tewas itu mencakup

¹⁷ Reza irfan, M. Faisal. Milisi Rohingnya dan Gejolak Konflik Etnis di Myanmar, 6 september 2017 <https://tirto.id/milisi-rohingya-dan-gejolak-konflik-etnis-di-myanmar-cv3g> di akses pada 2 januari 2021

¹⁸<https://www.voaindonesia.com/a/pemberontak-rohingya-sergap-pos-perbatasan-di-myanmar-71-tewas/4000397.html> di akses pada 2 januari 2021

sedikitnya 80 pemberontak dan 12 anggota pasukan keamanan. Hampir 2.000 orang telah mencapai Bangladesh hingga Jumat 25 Agustus 2017 setelah para pemborontak Rohingya menyerbu lebih dari 20 pos polisi di Rakhine.¹⁹ Atas peristiwa ini Tatmadaw (militer Myanmar) melalui Panglima Militer Min Aung Hlaing membalasnya dengan membakar habis wilayah desa Rakhine, juga melakukan pemerkosaan perempuan dan membunuh anak-anak. Setidaknya 6.700 warga etnis Rohingya tewas dalam waktu satu bulan setelah serangan ARSA pada otoritas sipil Myanmar.²⁰ 12 Berdasarkan citra satelit, HRW atau Human Rights Watch menyatakan daerah yang dibakar Tatmadaw lima kali lebih besar dibanding tahun 2016.

Peristiwa di awal Oktober 2016 tersebut mengekskalasi dan Pemerintah Myanmar mengambil sikap untuk membuat tim pencari fakta dan bahkan membentuk Komisi Penasehat yang dipimpin oleh Kofi Anan. DASSK seperti ingin netral tak ingin menyalahkan militer namun juga tidak mau kehilangan muka karena terjadi pelanggaran dalam pemerintahan demokrasi yang tengah dipimpinnya. PBB secara terpisah telah memberikan perhatian terhadap peristiwa ini dan telah membentuk tim pencari fakta. Namun hasil tim pencari fakta PBB secara tegas ditolak karena mereka melakukan investigasi di kamp pengungsi yang ada di Bangladesh, hingga akhirnya Tim itu tidak berikan visa untuk masuk Myanmar.

Penolakan hasil Tim PBB oleh pemerintah Myanmar atas saran dari National Security Advisor (NSA) tersebut diamini dan diikuti oleh sikap Panglima Militer Min Aung Hlaing dan juga oleh kelompok masyarakat lainnya, tidak terkecuali dari kelompok agama. Bahkan mereka mendukung upaya bahwa warga Rohingnya agar tetap tidak diberikan status kewarganegaraan Myanmar. Padahal salah satu saran

¹⁹ Ibid

²⁰ BBC, kelompok milisi bersumpah akan terus serang militer Myanmar
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42600770> di akses pada 4 januari 2021

dari Kofi Anan adalah untuk mengurangi dan meredam konflik mereka perlu diberi status kewarganegaraan. Hingga kini perdebatan solusi pemberian kewarganegaraan ini terus bergulir, solusi hukum, social dan keamanan masih terus menjadi bahasan di pemerintah Myanmar. Kemudian, pada 9 September 2017, ARSA mengumumkan gencatan senjata unilateral selama satu bulan dalam perang melawan tentara Myanmar. Gencatan senjata ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan menolong warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Gencatan senjata ini berlaku mulai 10 September 2017.

2. Dinamika konflik kemanusiaan Rohingya tahun 2014-2019

Konflik rohingnya sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, etnis rohingnya telah berkali-kali berusaha disingkirkan dari wilayahnya, kemudian pada tahun 2012 muncul gerakan yang bernama Rohingya Elimination Group yang didalangi oleh kelompok ekstrimis 969. Konflik yang pecah memakan 200 jiwa dan 1400 warga rohingnya lainnya dipaksa tinggal di kamp kamp yang sama sekali tidak layak. Menurut sebuah studi oleh International State Crime Initiative (ISCI) dari Queen Mary University of London, Rohingya sudah mulai memasuki tahap akhir genosida yaitu pemusnahan massal dan penghilangan dari sejarah. PBB juga menyebut Rohingya sebagai kelompok etnis paling teraniaya di dunia.²¹

Konflik tahun 2012 terjadi akibat tuduhan terhadap kasus pemerkosan yang dilakukan oleh 3 orang pemuda rohingya terhadap seorang perempuan etnis rakhine yang merupakan kekasih salah seorang pelaku. Hal ini terjadi pada tanggal 28 mei 2012 di daerah Ramee, wilayah Kyaukpyu, Provinsi Rakhine (Arakan).

²¹ “Tentang Rohingya ”<https://act.id/rohingya/> di akses pada 6 januari 2021

Penyerangan terhadap sebuah bus yang dilakukan oleh 30 pemuda Rakhine menyebabkan 10 orang yang diduga etnis Rohingya meninggal, hal ini terjadi enam hari setelah kasus pemerkosaan tersebut. Kemudian terjadi penyerangan di daerah Maungdaw, dimana masyarakat etnis Rakhine melakukan pembakaran terhadap rumah etnis Rohingya. Kesokan hari tanggal 9 Juni 2012, konflik meluas hingga ke Sittwe. Dalam konflik ini menyebabkan masyarakat dari kedua belah pihak etnis mengungsi.²²

Korban yang jatuh selama konflik antara bulan Mei hingga Juni 2012 terhitung 77 orang meninggal, 109 orang terluka, 5000 rumah rusak dan terbakar, 17 masjid mengalami kerusakan dan 15 tempat peribadatan Hindu pun tak luput dari kerusakan. Hal ini senad dengan laporan yang dilakukan oleh WHO dimana menyebutkan bahwa korban jiwa dalam konflik tersebut berjumlah sekitar 77 korban jiwa terdiri dari 31 warga etnis Rakhine dan 46 warga etnis Rohingya/Bengala.²³

Pada tahun 2015, pemerintah Myanmar mencabut seluruh status kewarga negaraan yang dimiliki oleh etnis Rohingnya, sehingga mereka tidak punya status kewarga negaraan lagi.²⁴

Total penduduk negara bagian Rakhine berdasarkan sensus 2014 tercatat 3,100.000 lebih, sebagian besar adalah suku Rakhine yang mayoritas adalah pemeluk Buddha 96,2% , penduduk yang beragama Kristen 1,8 dan 1,4% Muslim tetapi tidak mencakup Rohingya. Rohingya tidak turut disensus karena dianggap bukan warga negara.²⁵

Konflik tahun 2016 dimulai pada bulan Agustus ketika kelompok militan Rohingya menyerang 30 pos polisi dan sebuah kamp militer.

²²“Kerusuhan Rohingya dan Rakhine bukan merupakan konflik agama”
<https://berita.bhagavant.com/2012/08/16/kerusuhan-rohingya-dan-rakhine-bukan-konflik-agama.html> diakses pada 7 Januari 2021

²³ ibid

²⁴ “ Sekilas Sejarah tentang imigran Rohingya”
<https://news.okezone.com/read/2015/05/25/18/1154652/sekilas-sejarah-tentang-imigran-rohingya> diakses pada 7 Januari 2021

²⁵ Menengok fakta fakta di wilayah konflik Rakhine, Myanmar” <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40676548> di akses pada 7 Januari 2021

Kelompok militant yang menyebut dirinya dengan ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) yang dipimpin oleh Attaulah Abu Ammar Junnuni. Mereka berjumlah sekitar 200 hingga 300 orang dan menyerang dengan menggunakan tongkat, kayu dan besi. ARSA melakukan serangan pada bulan oktober tahun 2016 sebanyak tiga kali namun serangan bulan agustus merupakan yang terbesar. ARSA menyerang dengan luasan wilayah sekitar 100 kilometer dan juga diperkirakan memiliki kekuatan berjumlah 1.600 anggota. Serangan tersebut menewaskan 13 anggota kepolisian.²⁶

Pada bulan Juni 2017, terjadi pegerakan internal secara sporadis. Pergerakan masuk diamati dari komunitas aseli dan tempat penampungan sementara lainnya menuju Balukhali dan Kutupalong, dalam 2 bulan terakhir. Meningkatnya ketegangan antara komunitas aseli dan UMN dilaporkan, khususnya di desa-desa didekat penampungan sekitar yang mengalami hal tersebut. Jumlah rumah tangga UMN secara signifikan menempati komunitas aseli mengumpulkan bahan bantuan untuk membuat tempat tinggal sementara.²⁷

Pada tahun 2019, pejabat Myanmar mengonfirmasi penghancuran Kampung Myar Zin. Tepat di luar kota utama, Maungdaw, yaitu wilayah Myo Thu Gyi, yang dulunya berpenduduk lebih dari 8.000 warga Rohingya. Tahun 2017 pemukiman-pemukiman warga disana memang sudah sebagian terbakar, namun bangunan-bangunan besar masih ada, serta pepohonan yang mengelilingi daerah itu masih ada. Namun tempat itu telah berubah menjadi kompleks pemerintahan dan kepolisian, bahkan pepohonan yang mengelilingi daerah itupun sudah tidak ada.²⁸

²⁶ Begini awal mula serangan besar – besaran militant Rohingya di Rakhine
<https://news.detik.com/internasional/d-3632173/begini-awal-mula-serangan-besar-besaran-militan-rohingya-di-rakhine> di akses pada 7 januari 2021

²⁷ReliefWeb,Bangladesh:RohingyaSituationinCox'sBazaar- SituationReport,1-30June2017

²⁸<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49643468> di akses pada 7 januari 2021

3. Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Jokowi Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Di Rohingya Tahun 2014-2019

Sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang aktor rasional yaitu kepercayaan. Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Lebih dari 2/3 negara Anggota PBB memercayai bahwa Indonesia mampu membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia dengan cara-cara diplomatis.²⁹

Secara kolektif, langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia mengenai krisis Rohingnya adalah:

1. Melakukan operasi *Search and Rescue* (SAR) bagi para pengungsi yang masih terapung di lautan;
2. Melaksanakan patroli laut terkoordinasi dan memfasilitasi evakuasi di laut ketika kapal-kapal berisi migran tersebut ditemukan;
3. Menyediakan bantuan kemanusiaan, termasuk shelter, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya bagi migran yang terdampar di wilayah tiga negara;
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan UNHCR dan IOM dalam mengidentifikasi dan memverifikasi imigran, termasuk mencari negara ketiga untuk proses resettlement;
5. Mengaktifkan sumber daya milik *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)* untuk menyelesaikan krisis ini. Diluar itu, Indonesia di bawah pemerintahan

Indonesia mengupayakan penyelesaian konflik melalui forum-forum regional dan internasional, serta kerjasama bilateral dengan Myanmar yang didapatkan dari pertukaran informasi. Terdapat

²⁹ Yolemal Djumati, *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Jokowi Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Di Myanmar*

keuntungan tersendiri bagi Indonesia mengikuti forum-forum internasional karena dapat bertukar pendapat serta informasi untuk menangani kasus tersebut. Apalagi Kasus Rohingya ini sudah ada sejak tahun 2012 dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pemimpin Indonesia pada saat itu. SBY juga membawa Indonesia untuk aktif membantu dalam penyelesaian konflik negara lain. Indonesia selalu menjadi mediator negara-negara yang berkonflik. Kebijakan Luar Negeri SBY dalam membantu penyelesaian konflik etnis Rohingya ini dengan melakukan *soft diplomacy*. Dimana beliau menerima pengungsi Rohingya yang berdatangan, melakukan kerjasama dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI). OKI adalah Organisasi Internasional Islam yang bersifat non-militer, dimana Rohingya merupakan warga Muslim yang tertindas, dengan begitu Indonesia menunjukkan sikap solidaritas dengan membantu sesama Muslim. Selain itu, Indonesia pun menjadi pelopor pembahasan konflik Rohingya dalam forum KTT ASEAN, menunjuk PMI sebagai lembaga yang mengatur bantuan untuk warga Rohingya, dan terakhir memberikan bantuan dana sebesar Satu Juta Dollar AS kepada pengungsi Rohingya.

Dari periode sebelumnya pemerintahan Jokowi banyak mengamati dan berkewajiban untuk melanjutkan i'tikad baik tersebut. Melihat keadaan pengungsi Rohingya, membuat Jokowi selaku Presiden RI saat ini merasa prihatin. Dalam menyikapi kasus Rohingya ini, pemerintah Indonesia membuat Kebijakan Luar Negeri dengan mengirimkan Menteri Luar Negeri RI yakni Retno Marsudi untuk melakukan diplomasi dengan pemimpin Myanmar yakni Aung San Suu Kyi. Pertemuan antara Retno Marsudi selaku Menlu RI dan Aung San Suu Kyi selaku pemimpin Myanmar di Myanmar untuk menyampaikan keinginan Indonesia dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Upaya Indonesia dalam gerakan perdamaian ini mempunyai beberapa kebijakan luar maupun dalam negeri. Selanjutnya penulis paparkan

bentuk kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Myanmar dalam bentuk bantuan kemanusiaan, bantuan terhadap pengungsi serta *soft diplomacy*.

Kebijakan Pemberian Bantuan Kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan layaknya timbal balik untuk manusia. Saling membutuhkan dalam kesehariannya. Begitupun dengan kehidupan bernegara, Indonesia menunjukkan sikap peduli terhadap negara tetangga yang tertimpa krisis kemanusiaan. Menlu Retno menyampaikan 2 usulan konkrit yang dapat mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan tersebut yaitu:

- a) Mengatasi kebutuhan para pengungsi yang bersifat darurat. Bagi Indonesia, bantuan kemanusiaan harus terus diberikan kepada pengungsi. Rasa aman harus segera dijamin sehingga proses repatriasi pengungsi yang aman, sukarela dan bermartabat segera dapat dilakukan.
- b) Membantu menciptakan perdamaian yang berkesinambungan melalui pembangunan ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat Rakhine State. Fasilitas Pendidikan dan kesehatan harus diberikan. Roda perekonomian harus segera dapat digerakkan. Hal lain yang cukup penting adalah masyarakat yang toleran dan majemuk harus terus ditumbuhkembangkan.

Usulan tersebut kemudian dikaitkan dengan kebutuhan nasional sebagaimana fungsi *foreign policy* dalam konteks bantuan luar negeri, jika dianalisis melalui teori Kegley dan Withkopf kebijakan luar negeri merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang berwenang terhadap lingkungan internasional yang di dasari adanya kepentingan dan tujuan nasional serta sekaligus pendapat nilai dan instrumen dalam mengejar tujuan tersebut. Indonesia juga sebagai negara donatur dan inisiator bagi masuknya bantuan dana ke Myanmar, adalah bagian dari upaya membangun citra yang baik di hadapan dunia internasional, khususnya negara Asia Tenggara dan Myanmar. Citra tersebut merupakan modal

bagi Indonesia untuk menaikkan levelnya menjadi negara terpandang dan disegani, dengan pertimbangan riwayat pengalaman dan sepak terjangnya dalam memediasi konflik, juga dalam mempromosikan perdamaian internasional.

Kebijakan Bantuan Ke Pengungsi

Penanganan pengungsi dilakukan melalui Desk Penanganan Pengungsi Luar Negeri dan Perdagangan Manusia (P2LNPM) di bawah Kemenko Polhukam. Dalam koordinasinya dengan UNHCR dan IOM, Pemri memfasilitasi sekitar 13.840 pengungsi dan pencari suaka yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia terlepas dari status Indonesia yang bukan Negara Pihak Konvensi Pengungsi 1951. Dalam penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia, khususnya khususnya dalam situasi darurat, Pemerintah Indonesia secara akonsisten memberikan pertimbangan khusus berlandaskan prinsip kemanusiaan dan aspirasi HAM global, serta menghormati prinsip-prinsip kebiasaan internasional dalam penanganan pengungsi seperti non-refoulement.³⁰

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden no. 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang dipergunakan sebagai landasan normatif dan koordinatif bagi Kementerian maupun Lembaga dalam penanganan pengungsi dari luar negeri dengan keterlibatan peran Pemerintah Daerah. Perpres tersebut mengatur tahapan penanganan pengungsi di Indonesia pada saat penemuan, pengamanan, penempatan sementara, dan pengawasan keimigrasian.

Pada Mei 2015, nelayan aceh menyelamatkan sekitar 800 migran asal Rohingya dan Bangladesh dengan menarik perahu para migran ke tepi pantai Indonesia. Bekerja sama dengan UNHCR, Indonesia mendata para migran asal Rohingya dan Bangladesh tersebut, dengan tujuan memastikan identitas, asal negara, dan alasan meninggalkan negara asal. UNHCR memastikan bantuan pendanaan masyarakat

³⁰ Kemlu

internasional bagi penampungan pengungsi Rohingya di Indonesia. Indonesia menerima para pengungsi atas nama kemanusiaan.³¹

Dalam masa penampungan tersebut, terdapat permasalahan soal dana. Ketiadaan dana alokasi khusus menghambat proses penampungan pengungsi. Anggaran untuk tahun 2015 yang sudah dibuat tidak mungkin dialokasikan untuk penanganan pengungsi, karena sudah dialokasikan untuk hal lain. Satu- satunya bantuan yang dapat diberikan pemerintah yaitu lahan penampungan. Untuk penanganan pengungsi, pemerintah daerah mengeluarkan dana sebesar Rp. 441,35 juta selama 13 hari, yang hanya memenuhi kebutuhan makan. Kepala Dinas Sosial Kota Kuala Langsa, Mursyidin, mengatakan dana yang digunakan tersebut bukanlah dana APBD, melainkan anggaran dari IOM. Pemerintah daerah hanya menalangi saja, kemudian meminta ganti kepada IOM atas dana yang sudah dikeluarkan tersebut.³²

Pada Desember 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani “*Refugee Decree*”, Peraturan Presiden (Perpres) No. 125/2016 dalam Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden tersebut merupakan peraturan tentang regulasi pengungsi pertama setelah mandat untuk membuat satu setelah 15 tahun lamanya di bawah *1999 Law on Foreign Relation*.³³

Selain kebijakan pengungsi di dalam negeri, Pada Rabu 13 September 2017 Pemerintah Indonesia mengirim bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Muslim etnis Rohingya yang menjadi korban di negara bagian Rakhine, Myanmar. Sebagian warga ditampung di wilayah Bangladesh yang berbatasan dengan Myanmar.

³¹ Simela Victor M., 2015, “*Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, dan ASEAN*”, Info Singkat Hubungan Internasional Vol. VII, No.10/II/P3DI, hlm. 6-7

³² Febrina Firdaus, 2015, *Pemerintah Janji Tampung Pengungsi, Tapi Tak Ada Dana Khusus Untuk Mereka*, diakses dari <https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/94626-tak-ada-dana-alokasi-khusus-untuk-rohingya> pada 19 Desember 2020 Pukul 17.00 WIB

³³ Dio Herdiawan Tobing, 2018, *A Year of Jokowi's Refugee Decree: What has changed?*, diakses dari <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/01/12/a-year-of-jokowis-refugee-decree-what-has-changed.html> pada 15 Desember 2020 Pukul 08.00 WIB

Sebelumnya pada 4 September 2016, Menlu RI mengunjungi Myanmar dan melakukan pembicaraan dengan Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing. Dari Myanmar, Menlu Retno melanjutkan ke Bangladesh untuk membahas penanganan pengungsi Rohingya. Beliau mengadakan pertemuan dengan UNHCR, IOM, dan Menlu Bangladesh. Membahas kelanjutan dari upaya penanganan pengungsi serta memberi informasi bahwa Myanmar sudah buka pintu terhadap bantuan kemanusiaan. Di sisi lain, Menlu Retno menyatakan ada banyak pihak yang ingin berkontribusi untuk warga Rohingya yang menjadi pengungsi di Bangladesh dan yang menjadi korban konflik di Rakhine. Berbagai kelompok di Indonesia sejak beberapa hari terakhir terus melakukan upaya penggalangan dana untuk membantu pengungsi Rohingya, dan pemerintah siap menyalurkan bantuan kemanusiaan tersebut. Data dari UNHCR menunjukkan bahwa pengungsi Rohingya terus berdatangan di kamp pengungsian Kutupalong dan Nayapara, dimana UNHCR beroperasi. Populasi pengungsi di kedua kamp itu telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 25 Agustus 2016.³⁴

Hingga 18 September 2017 Pemerintah Indonesia telah 8 kali melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Bangladesh. Total bantuan Indonesia yang tiba, sebanyak 74 ton. Bantuan Indonesia sebanyak 20 ton tiba dengan 2 pesawat C-130 Hercules TNI AU.³⁵ Bantuan kemanusiaan berupa beras (30 ton), selimut (14.000), sarung (17.400), makanan siap saji (2490 paket), generator listrik (10 set) tenda

³⁴ Lutfia Tisnadibrata, *Indonesia Kirim Bantuan untuk Pengungsi Rohingya* <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/bantuan-indonesia-untuk-rohingya-09132017140124.html> pada 13 Desember 2020 Pukul 03.00 WIB

³⁵ Panca Rini, *Tribunnews.com*, 8 Kali Pengiriman, 74 Ton Bantuan Indonesia untuk Rohingya Tiba Di Bangladesh <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/18/8-kali-pengiriman-74-ton-bantuan-indonesia-untuk-rohingya-tiba-di-bangladesh>. pada 12 Desember 2020 Pukul 14.00 WIB

besar (20 unit), tangki air fleksibel (10 unit), *family kit* (850 paket), pakaian (900 paket), gula pasir (1 ton), minyak goreng (325 boks), dan biskuit (2000 boks). Pada hari itu Pemerintah Bangladesh melalui *Additional Deputy Commissioner of Cox's Bazar* telah menyalurkan bantuan kemanusiaan Indonesia yakni beras dan nasi masak pada 12 ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh pada kamp Kutupalong 1 dan 2 serta Balukhali.

Kebijakan Melakukan Diplomasi Bilateral Indonesia Terhadap Myanmar

Pada 6 Desember 2016, Presiden Jokowi memberangkatkan Menteri Retno ke Nay Pyi Taw untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi. Menlu Retno membahas kepedulian Indonesia terhadap kekerasan yang terjadi serta kesiapan Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan.³⁶ Menteri Retno juga menyampaikan agar Indonesia dan Myanmar membuka dialog antar agama. Indonesia dan Myanmar pun sepakat untuk menggelar dialog antar agama.³⁷

Setelah pertemuan diatas, 19 Desember 2016, disela-sela penarikan kembali Menteri Luar Negeri ASEAN dari Yangon, Myanmar, Menlu Retno mengadakan diskusi bilateral dengan Aung San Suu Kyi. Beliau mengusulkan agar Myanmar menjadi tuan rumah guna menguatkan persatuan dan solidaritas ASEAN. Suu Kyi menyetujui hal tersebut sebagai wadah informal bagi negara anggota ASEAN untuk mengekspresikan kepeduliannya terhadap kekerasan yang sedang terjadi, dan dengan sedikit harapan agar Myanmar menerima bantuan kemanusiaan yang diberikan ASEAN di Rakhine.³⁸

Selain itu dialog antar agama yang diusulkan Menteri Retno saat berkunjung ke Myanmar pada Desember 2016 juga mulai berjalan.

³⁶InstituteForPolicyAnalysisofConflict,(2018),“*IndonesiaAnd The Rohingya Crisis*”, pp.5

³⁷ Tribunnews, (2016), *Indonesia dan Myanmar Gelar Dialog Antar Agama, Selesaikan Konflik Etnis Rohingya*, diakses dari <http://jambi.tribunnews.com/2016/12/07/indonesia-dan-myanmar-gelar-dialog-antar-agama-selesaikan-konflik-etnis-rohingya> pada 12 Desember 2020 Pukul 14.00 WIB

³⁸*Loc. cit.* Institute For Policy Analysis of Conflict

Perwakilan dari Indonesia pada awalnya direncanakan akan berangkat ke Myanmar pada Maret 2017. Dengan tujuan untuk memprakarsai langkah-langkah mewujudkan pluralisme di Myanmar.³⁹ Namun dialog yang pertama tertunda hingga Mei 2017, Menteri Retno menerima delegasi dari Myanmar perihal dialog antar agama pertama antara Indonesia-Myanmar.⁴⁰

Setelah diadakan pertemuan dan dialog antar agama Pada 25 Agustus 2017, ARSA kembali berulah dengan menyerang 30 pos polisi dan markas militer. Hal tersebut menimbulkan balasan dari militer Myanmar dan masyarakat Buddha bersenjata yaitu berupa pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran desa-desa. Akibatnya terjadilah eksodus pengungsi besar-besaran, sebanyak 700.000 etnis Rohingya diusir dari Rakhine ke Bangladesh hanya dalam hitungan beberapa minggu saja.⁴¹

Indonesia yang sudah terus membantu Rohingya dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan seperti yang telah dibahas sebelumnya pun tidak bisa tinggal diam. Diplomasi yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia lewat Menteri Retno pada 2016 dan 2017 membuat Indonesia berada dalam posisi yang bagus untuk segera bertindak cepat dalam merespon kekerasan tersebut.⁴²

Pada 3 September 2017, Presiden Jokowi mengadakan konferensi pers di istana negara, kemudian mengumumkan bahwa beliau telah menginstruksikan Menlu Retno untuk diplomasi terhadap Myanmar agar meminta Myanmar segera menyudahi kekerasan yang telah terjadi, melindungi masyarakat Muslim Myanmar, serta memastikan akses

³⁹ Marcheilla Putri, (2017), *Dorong Perdamaian, Indonesia Prakarsai Dialog Antaragama di Myanmar*, diakses dari <https://www.merdeka.com/dunia/dorong-perdamaian-indonesia-prakarsai-dialog-antaragama-di-myanmar.html> pada 9 Januari 2021

⁴⁰ Republika, (2017), *Retno Marsudi Receives Myanmar Delegation for Interfaith Dialogue*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/en/national-politics/17/05/22/oqd1xd414-retno-marsudi-receives-myanmar-delegation-for-interfaith-dialogue> pada 12 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB

⁴¹ Op, cit. Institute For Policy Analysis of Conflict, (2018) pp.6

⁴²Idem,.

untuk organisasi kemanusiaan terhadap Rohingya. Presiden Jokowi juga telah menyatakan telah meminta Menlu Retno untuk membuka diskusi intensif dengan Antonio Guterres, Sekretaris Jendral PBB, dan juga Kofi Annan.⁴³

Keesokannya, Menlu Retno berangkat ke Myanmar untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi, Konsular Myanmar, dan Jendral U Min Aung Hlaing, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar. Pada kesempatan tersebut, Menlu Retno menyampaikan perhatian dari rakyat Indonesia terhadap konflik yang sedang terjadi, serta kesiapan Indonesia dalam membantu penyelesaian masalah tersebut. Pada agenda diplomasi tersebut, Menlu Retno mengusulkan sebuah solusi penyelesaian masalah kemanusiaan dengan “Formula 4+1”. Formula 4+1 ini terdiri dari:

1. Mengembalikan stabilitas dan keamanan
2. Pengendalian diri secara maksimal dan komitmen untuk tidak lagi menggunakan kekerasan
3. Melindungi seluruh orang yang tinggal di Rakhine, dengan tidak memandang ras maupun agama
4. Dan segera membuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Keempat formula tersebut dilengkapi dengan “+1”, yaitu menerapkan rekomendasi dari Kofi Annan, *Advisory Commission on Rakhine State*.⁴⁴ Menlu Retno menyampaikan keinginannya untuk melihat proses konstruksi dari rumah sakit Indonesia yang dibangun di Mrauk-U.⁴⁵

Setelah pertemuan dengan Pemimpin Myanmar, Menlu Retno juga berangkat ke Dhaka, Bangladesh, keesokan harinya. Menlu Retno

⁴³ DW, “Indonesia Turun Tangan Bantu Rohingya”, diakses dari <http://www.dw.com/id/indonesia-turunan-tangan-bantu-rohingya/a-40351496> pada 1 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB

⁴⁴ Foreign Minister Presents the 4+1 Formula Proposal to the Myanmar State Counsellor, *Kemlu RI*, 04 September 2017; diakses dari <https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/Foreign-Minister-Presents-the-4-1-Formula-Proposal-for-Rakhine-State-to-the-Myanmar-State-Counsellor.aspx> pada 1 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB

⁴⁵ Op, Cit. Institute For Policy Analysis of Conflict, (2018) pp.7

bertemu dengan Perdana Menteri Bangladesh, Sheik Hasina, dan Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali untuk berdiskusi mengenai kondisi kamp pengungsi Rohingya serta kesiapan Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan ke Bangladesh.⁴⁶ Koordinasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Bangladesh dinilai harus dilakukan, agar secara komprehensif masalah ini terselesaikan. Setelah seminggu, keberangkatan empat pesawat Hercules yang berisi 34 ton siap untuk bantu kemanusiaan di bandar udara Halim Perdana Kusuma.⁴⁷

Pada tahun 2018 bantuan dan diplomasi semakin renggang dikarenakan konflik sudah meredam. Pada 27 April 2018, Presiden Jokowi bertemu secara bilateral dengan Presiden Republik Persatuan Myanmar, Win Myint di Singapura. Presiden Jokowi juga didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, serta Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.⁴⁸ Pertemuan tersebut membahas keprihatinan Indonesia terkait krisis kemanusiaan di Rakhine State serta dampaknya yang terjadi di Bangladesh. Presiden Jokowi juga menyinggung mulai masuknya pengungsi Rakhine State ke Indonesia serta menyampaikan kesiapan Indonesia untuk terus membantu Myanmar, baik secara diplomasi bilateral dan juga bantuan kemanusiaan, terutama juga terkait pemulangan pengungsi dari Cox's Bazar ke Rakhine State secara sukarela, aman, dan terhormat.⁴⁹

⁴⁶ Indonesian Foreign Minister to Meet with Bangladesh PM to Discuss Rohingya Issue, *Setkab RI*, diakses dari <http://setkab.go.id/en/indonesian-foreign-minister-to-meet-with-bangladesh-pm-to-discuss-rohingya-issue/> pada 2 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB

⁴⁷ Op, Cit. Institute For Policy Analysis of Conflict, (2018), pp.7

⁴⁸ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (2018), *Bertemu Presiden Myanmar, Presiden Jokowi Sampaikan Kesiapan Bantu Pemulangan Pengungsi Rohingya*, diakses dari <http://setkab.go.id/bertemu-presiden-myanmar-presiden-jokowi-sampaikan-kesiapan-bantu-pemulangan-pengungsi-rohingya/> pada 3 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB

⁴⁹ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (2018), *Bertemu Presiden Myanmar, Presiden Jokowi Sampaikan Kesiapan Bantu Pemulangan Pengungsi Rohingya*, diakses dari <http://setkab.go.id/bertemu-presiden-myanmar-presiden-jokowi-sampaikan-kesiapan-bantu-pemulangan-pengungsi-rohingya/> pada 3 Januari 2021 Pukul 13.00 WIB

Berdasarkan uraian kebijakan luar negeri Indonesia diatas, serta berpandangan rasional pemerintah Indonesia mengambil langkah rasional dengan membantu melalui bantuan fisik maupun diplomasi. Padahal bisa terjadi jika Indonesia tidak terlibat pada konflik tersebut. Namun pada akhirnya dampak baik menyertai pemerintah Indonesia. Melihat kondisi yang terjadi kepada etnis Rohingya, Indonesia tidak membenarkan aksi penindasan atas etnis Rohingya, serta tidak bisa bertindak diam. Walaupun penindasan yang terjadi bukan dilakukan oleh penjajah melainkan pemerintah sendiri, namun rasa dan dampak yang timbul karena hal tersebut kurang lebih sama. Maka dari itu, Indonesia berperan aktif dengan melakukan langkah-langkah diplomasi maupun pemberian bantuan kemanusiaan, demi tercapainya perdamaian dan keadilan sosial bagi Myanmar pada umumnya, dan etnis Rohingya pada khususnya.

D KESIMPULAN

Kebijakan luar negeri indonesia era presiden jokowi dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di rohingya tahun 2014-2019 adalah :

- a. Kebijakan pemberian bantuan kemanusiaan. Berupa pemberian bantuan kemanusiaan untuk mengatasi kebutuhan para pengungsi yang bersifat darurat.
- b. Kebijakan bantuan ke pengungsi. Bantuan teradap pengungsi yang memfasilitasi sekitar 13.840 pengungsi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia serta pengungsi di Bangladesh.
- c. Kebijakan melakukan diplomasi bilateral Indonesia terhadap Myanmar. Diplomasi bilateral Indonesia terhadap Myanmar yang berisi beberapa pertemuan salah satunya untuk mengusulkan sebuah solusi penyelesaian masalah kemanusiaan dengan “Formula 4+1”.

E DAFTAR REFERENSI

Sumber Buku & Karya Ilmiah

- Charles W. Kegley Jr., *World Politics, Trend, and Transformation*, University of Memphis, USA, 2011
- Fatih Tayfur, *Main Approaches to The Study of Foreign Policy: A Review*, Department of International Relations, Middle East Technical University, Turkey, 1994
- Graham Allison, Philip Zelikow, *Essence of Decision Making: Explaining the Cuban Missile Crisis*, 2nd Edition, Longman Inc., 1999.
- Institute For Policy Analysis of Conflict, (2018), “*Indonesia And The Rohingya Crisis*”, pp.5
- Kegley Charles W. Jr, Wittkopf Eugene R, *World Politics: Trend and Transformation*, 6 th ed., New York: St.Martin’s Press, 2001.
- Laode Muhamad Fathun *Geo Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Era Jokowi Dalam Perspektif Konstruktivisme* UPN “Veteran” Jakarta *Islamic World and Politics* Vol.2. No.2 July-December 2018
- Mark Webber, Michael Smith, *Foreign Policy in Transformed World*, Prentice Hall, London, 2002
- Relief Web, Bangladesh: Rohingya Situation in Cox’s Bazaar - Situation Report, 1 - 30 June 2017*
- Simela Victor M., 2015, “*Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, dan ASEAN*”, *Info Singkat Hubungan Internasional* Vol. VII, No.10/II/P3DI
- UNICEF report on Banglades, May 2017*
- United Nations Security Council, *Statement by the President of the Security Council*, 6 November 2017
- Yanyan Mochmad Yani, *Politik Luar Negeri*, (Paper yang disampaikan dalam kegiatan Seminar Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau Sesko TNI AU, Angkatan ke-44 TP 2007), Bandung, 16 Mei 2007
- Yolemal Djumati, *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Jokowi Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Di Myanmar*

Sumber Internet

Menengok fakta fakta di wilayah konflik rakhine, Myanmar”

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40676548> di akses pada 7 januari
2021

Begini awal mula serangan besar – besaran militant Rohingya di Rakhine
[https://news.detik.com/internasional/d-3632173/begini-awal-mula-serangan-
besar-besaran-militan-rohingya-di-rakhine](https://news.detik.com/internasional/d-3632173/begini-awal-mula-serangan-besar-besaran-militan-rohingya-di-rakhine) di akses pada 7 januari 2021

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42351386> di akses pada 7 januari 2021

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49643468> di akses pada 7 januari 2021

Republika, *Wapres Fasilitasi Pertemuan MER-C dan Walubi Bangun RS di
Myanmar*, diakses dari

[https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/16/o8u99t280-
wapres-fasilitasi-pertemuan-merc-dan-walubi-bangun-rs-di-myanmar](https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/16/o8u99t280-wapres-fasilitasi-pertemuan-merc-dan-walubi-bangun-rs-di-myanmar)

diakses pada 6 Januari 2021

Febrina Firdaus, 2015, *Pemerintah Janji Tampung Pengungsi, Tapi Tak Ada
Dana Khusus Untuk Mereka*”, diakses dari

[https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/94626-tak-
ada-dana-alokasi-khusus-untuk-rohingya](https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/94626-tak-ada-dana-alokasi-khusus-untuk-rohingya) pada 19 Desember 2020

Dio Herdiawan Tobing, 2018, *A Year of Jokowi’s Refugee Decree: What has
changed?*, diakses dari

[https://www.thejakartapost.com/academia/2018/01/12/a-year-of-jokowis-
refugee-decree-what-has-changed.html](https://www.thejakartapost.com/academia/2018/01/12/a-year-of-jokowis-refugee-decree-what-has-changed.html) pada 15 Desember 2020

Lutfia Tisnadibrata, *Indonesia Kirim Bantuan untuk Pengungsi*

Rohingya[https://www.benarnews.org/indonesian/berita/bantuan-indonesia-
untuk-rohingya-09132017140124.html](https://www.benarnews.org/indonesian/berita/bantuan-indonesia-untuk-rohingya-09132017140124.html) pada 13 Desember 2020

Panca Rini, [Tribunnews.com](http://tribunnews.com), 8 Kali Pengiriman, 74 Ton Bantuan Indonesia untuk
Rohingya Tiba Di Bangladesh

[https://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/18/8-kali-pengiriman-74-
ton-bantuan-indonesia-untuk-rohingya-tiba-di-bangladesh](https://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/18/8-kali-pengiriman-74-ton-bantuan-indonesia-untuk-rohingya-tiba-di-bangladesh). pada 12

Desember 2020

Tribunnews, (2016), *Indonesia dan Myanmar Gelar Dialog Antar Agama,
Selesaikan Konflik Etnis Rohingya*, diakses dari

<http://jambi.tribunnews.com/2016/12/07/indonesia-dan-myanmar-gelar->

[dialog-antar-agama-selesaikan-konflik-etnis-rohingya](#) pada 12 Desember 2020

Marcheilla Putri, (2017), *Dorong Perdamaian, Indonesia Prakarsai Dialog Antaragama di Myanmar*, diakses dari

<https://www.merdeka.com/dunia/dorong-perdamaian-indonesia-prakarsai-dialog-antaragama-di-myanmar.html> pada 9 Januari 2021

Republika, (2017), *Retno Marsudi Recieves Myanmar Delegation for Interfaith Dialogue*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/en/national-politics/17/05/22/oqd1xd414-retno-marsudi-receives-myanmar-delegation-for-interfaith-dialogue> pada 12 Januari 2021

DW, “*Indonesia Turun Tangan Bantu Rohingya*”, diakses dari

<http://www.dw.com/id/indonesia-turun-tangan-bantu-rohingya/a-40351496> pada 1 Januari 2021

Foreign Minister Presents the 4+1 Formula Proposal to the Myanmar State Counsellor, *Kemlu RI*, 04 September 2017; diakses dari

<https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/Foreign-Minister-Presents-the-4-1-Formula-Proposal-for-Rakhine-State-to-the-Myanmar-State-Counsellor.aspx> pada 1 Januari 2021

Indonesian Foreign Minister to Meet with Bangladesh PM to Discuss Rohingya Issue, *Setkab RI*, diakses dari <http://setkab.go.id/en/indonesian-foreign-minister-to-meet-with-bangladesh-pm-to-discuss-rohingya-issue/> pada 2 Januari 2021

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (2018), *Bertemu Presiden Myanmar, Presiden Jokowi Sampaikan Kesiapan Bantu Pemulangan Pengungsi Rohingya*, diakses dari <http://setkab.go.id/bertemu-presiden-myanmar-presiden-jokowi-sampaikan-kesiapan-bantu-pemulangan-pengungsi-rohingya/> pada 3 Januari 2021

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (2018), *Bertemu Presiden Myanmar, Presiden Jokowi Sampaikan Kesiapan Bantu Pemulangan Pengungsi Rohingya*, diakses dari <http://setkab.go.id/bertemu-presiden-myanmar-presiden-jokowi-sampaikan-kesiapan-bantu-pemulangan-pengungsi-rohingya/>

[pengungsi-rohingya/](#) pada 3 Januari 2021

Draft UN Resolution Pressures Myanmar Over Rohingya Crisis, *The New Arab*,
26 Oktober 2017, diakses dari

<https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/10/26/draft-un-resolution-pressures-myanmar-over-rohingya-crisis> pada 3 Januari 2021

Johannes Nainggolan, *Ada Target Yang Ingin Dicapai Indonesia Dengan Membantu Rohingya*, diakses dari

<https://politik.rmol.co/read/2017/09/19/307790/Ada-Target-Yang-Ingin-Dicapai-Indonesia-Dengan-Membantu-Rohingya> pada 3 Januari 2021

<https://berita.bhagavant.com/2012/08/16/kerusuhan-rohingya-dan-rakhine-bukan-konflik-agama.html> diakses pada 7 Januari 2021

<https://hrwg.org/2017/09/03/diplomasi-penyelesaian-konflik-permanen-indonesia-myanmar-diperlukan-untuk-mencegah-keberlangsungan-brutalitas-dan-kekerasan/> diakses pada Senin, 10 Juli 2020

<https://news.okezone.com/read/2015/05/25/18/1154652/sekilas-sejarah-tentang-imigran-rohingya> diakses pada 7 Januari 2021

<https://news.okezone.com/read/2017/08/31/18/1767078/kronologi-kekerasan-di-rakhine-pemicu-eksodus-muslim-rohingya?page=3> diakses pada Senin, 6 Juli 2020

“Tentang Rohingnya ”<https://act.id/rohingya/> di akses pada 6 Januari 2021